

## PENDIDIKAN ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

AMIN NASRULLAH

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara

Jl. Gunung Kombeng, No. 27, Tenggarong

Email: aminnasrullkhan77@gmail.com

### ABSTRACT

*Education and society have a reciprocal, mutual influence (reciprocal) relationship. This article discusses the relationship between Islamic education and social change in two directions at once, namely what and how the role of Islamic education in driving social transformation (reconstruction) and conversely, what role should be carried out by the Islamic education in the midst of changing social life. The analysis in this article was developed using the assumptions of the categorization of education ideology as used by Henry Giroux and Aronowitz, that divided educational ideology into three major streams, namely conservative, liberal, and critical. The mapping of the ideological and educational paradigms is carried out to review the position of Islamic education in the great currents of educational ideology, and the possible choices that can be taken so that Islamic education is able to play its function, namely the function of equality and social egalitarianism. Likewise the function and role of Islamic education in social transformation, to rebuild (reconstruction) systems and social order that are balanced, democratic, and just.*

**KEYWORDS:** *Islamic Education, Social Order, Globalisasi*

### PENDAHULUAN

Pendidikan dan masyarakat merupakan dua variabel yang tak dapat dipisahkan. Adolphe E. Meyer sebagaimana dikutip oleh Abdul Rohman (dalam Ismail SM.et.all, 2001:308-309) menyatakan bahwa antara pendidikan dan masyarakat saling merefleksi, hubungan antara keduanya tidak bersifat linear, melainkan hubungan timbal balik (mutual simbiosis). Oleh karena itu, membahas tentang pendidikan dan perubahan, berarti akan berbicara-setidaknya-dalam dua konteks pembahasan sekaligus.

Pertama, berkaitan dengan peran atau fungsi pendidikan dalam mendorong terjadinya proses transformasi (perubahan) sosial. Di sini diasumsikan bahwa pendidikan harus memerankan fungsi untuk merekonstruksi (merubah dan membentuk kembali) sistem dan tatanan sosial menuju ke arah yang ideal. Transformasi menuju demokratisasi, kesejajaran, keadilan, dan pembebasan. Kedua, berkaitan dengan bagaimana kita mengelola dan mengarahkan pendidikan dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan global yang membawa perubahan pada gaya hidup dan pola pikir masyarakat-dimana pendidikan diharuskan mampu mengantisipasinya. Dengan kata lain adalah melakukan reorientasi dan pembaharuan terhadap pendidikan, dalam hal ini pendidikan Islam, agar dapat tetap eksis dan tidak kehilangan relevansinya terhadap kehidupan

manusia yang berubah itu.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas kedua permasalahan di atas, meskipun lebih menekankan pembahasan pada aspek permasalahan yang pertama, yakni peran pendidikan Islam dalam mendorong proses transformasi sosial. Hal ini berarti tulisan ini juga akan membahas ideologi- ideologi yang ikut membangun paradigma pendidikan yang mendominasi praktek pendidikan selama ini. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa, sesungguhnya mampu-tidaknya pendidikan dalam mendorong dan mengawal proses transformasi sosial itu sangatlah dipengaruhi dan bergantung pada bagaimana paradigma pendidikan tersebut. Sedangkan paradigma itu berkaitan dengan ideologi pendidikan mana yang dianut atau ideologi apa yang berpengaruh pada (dibawah oleh) pendidikan tersebut.

Maka, sebelum lebih jauh berbicara masalah pendidikan Islam dan perubahan, dalam tulisan ini terlebih dahulu ditinjau secara singkat ideologi-ideologi yang berpengaruh pada pendidikan tersebut. Baru kemudian membahas bagaimana idealnya pendidikan- terutama pendidikan Islam- mengambil peran..

## **PEMBAHASAN**

### **1. Sepintas Tinjauan Terhadap Paradigma Pendidikan**

Jika kita menggunakan pemetaan paradigma pendidikan yang dipakai oleh Giroux and Aronowitz (1985), maka kita melihat bahwa praktek pendidikan yang selama ini berlangsung, umumnya didominasi oleh tiga ideologi besar, yang menurunkan tiga paradigma besar pendidikan, yakni Konservatif, Liberalis, dan Radikal (Kritis). Dari tiga ideologi tersebut, Konservatif dan Liberal merupakan ideologi yang dominan, dimana pemikiran filosofis dan sistem etika sosial dasarnya menjadi mainstream dalam praktek pendidikan.

Menurut William F O'neil (2001:99), ideologi Konservatif dalam perkembangannya telah melahirkan tiga aliran konservatif dalam pendidikan (konservatisme pendidikan). Demikian pula ideologi Liberal, telah melahirkan tiga aliran liberal dalam pendidikan (liberalisme pendidikan).

Jika dilihat dari watak dasarnya, paradigma Konservatif dan Liberal sangat berbeda dengan paradigma yang ketiga, yakni Radikal (Kritis). Mansour Fakih (2001:20-27 dan pengantar dalam O'neil, 2001:x-xxi), mengidentifikasi bahwa paradigma kritis mempunyai watak dan ciri-ciri progresif, transformasi sosial, dan membebaskan, sedangkan Konservatif dan Liberal mempunyai ciri-ciri sebaliknya; anti perubahan, mendukung kemapanan (status quo), serta reproduksi sosial dan nilai-terutama paradigma Konservatif. Paradigma (pendidikan) liberal, meskipun ia setuju dengan perubahan, tetapi perubahan yang terjadi dengan sendirinya (tanpa diusahakan) dan lamban. Paradigma liberal juga cenderung memisahkan antara pendidikan dengan masalah politik, tatanan sosial dan perubahan masyarakat.

Dengan demikian, maka ada relevansi yang signifikan antara fakta kemandegan transformasi sosial yang terjadi dalam kehidupan kita dengan paradigma yang mendominasi pendidikan ini-pendidikan konservatif dan pendidikan liberalis. Relevansi yang signifikan antara kedua variabel tersebut

bukan saja karena paradigma pendidikan konservatif dan liberal itu tidak membebaskan manusia dan mendorong transformasi sosial, melainkan juga adanya indikasi bahwa kedua paradigma pendidikan itu dalam prakteknya justru mengimplikasikan terjadinya penindasan dan “distransformasi” sosial. Dengan kata lain, mewariskan reproduksi sosial dan peneguhan terhadap sistem nilai yang menindas tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari asumsi dan pandangan kedua paradigma pendidikan tersebut. Paradigma konservatif, karena memang bertujuan untuk menciptakan kestabilan dan melestarikan sistem yang ada, sedangkan liberal karena pemisahannya pendidikan dengan persoalan politik dan sosial-kemasyarakatan.

Pemetaan ideologi pendidikan sebagaimana di atas, dipergunakan oleh Henry Giroux and Aronowitz. Pemetaan ini menempatkan pendidikan liberal dan konservatif dalam satu kutub yang sama, dan hal ini beralasan bila dilihat dari sudut pandang bahwa kaum liberal dan konservatif sama-sama berpendirian bahwa pendidikan adalah a-politik, dan “*excellence*” haruslah merupakan target utama pendidikan (Fakih, 2001:20). Kaum konservatif berpendirian, bahwa tidak ada yang salah dalam struktur sosial masyarakat; jika ada maka itu merupakan kesalahan masyarakat/individu sendiri, bukan struktur sosial dan struktur nilainya. Sehingga masyarakat/individu yang harus menyesuaikan dengan struktur yang ada.

Sedangkan kaum liberal memandang, bahwa masalah masyarakat dan pendidikan adalah dua masalah yang berbeda. Tidak ada kaitan pendidikan dalam struktur kelas dan dominasi politik dan budaya serta diskriminasi yang ada di masyarakat luas. Pendidikan bukan dimaksudkan untuk merubah struktur sosial ataupun struktur nilai yang dalam masyarakat. Bahkan, pendidikan justru dimaksudkan sebagai sarana untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat. Pendidikan justru dimaksudkan sebagai media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik (Fakih, 2001).

Sehingga, dengan demikian, pendidikan konservatif maupun liberal sama-sama melahirkan/mengimplikasikan bentuk-bentuk penindasan, ketidakadilan, pemaparan nilai, melanggengkan ketimpangan sosial, serta tidak mendorong terjadinya transformasi sosial.

Maka cukup beralasan, jika William F. Buckley (dalam Paulo Freire et. all, 2001:157) mensifati generasi liberal sebagai generasi bisu; generasi konformis, generasi yang terlalu sadar akan keamanan, hampa, tanpa target. Sikap penganut liberal ini, menurut Buckley, menggambarkan rasa ketidakberdayaan pribadi yang terpantul di setiap tingkat. Bahwa, tidak ada yang dapat dilakukan oleh pendidikan terhadap alur sejarah. Tidak ada; tak seorangpun bisa berbuat apa-apa. Peristiwa-peristiwa besar di dunia modern adalah urusan birokrat dan sosiolog.

Dengan demikian, pendidikan yang memakai paradigma konservatif dan liberal tersebut mempunyai potensi dan peran signifikan dalam menumbuhkan sistem dan konstruk yang menindas. Baik dalam implikasi praksis pelaksanaan pendidikan maupun dalam implikasi sosial kemasyarakatan yang lebih luas.

Menurut Mansour Fakih (dalam O’neil, 2001:xviii), pada saat yang sama

liberalisme juga tidak memungkinkan bagi pendidikan untuk menciptakan ruang (space) bagi sistem pendidikan untuk secara kritis mempertanyakan tentang struktur ekonomi, politik, ideology, gender, lingkungan serta hak-hak asasi manusia dan kaitanya dengan posisi pendidikan. Juga untuk menyadari relasi pengetahuan sebagai kekuasaan (*knowledge/ power relation*) menjadi masalah demokratisasi. Inilah penyebab tidak terjadinya transformasi sosial.

Hal tersebut diperkuat oleh keyakinan yang menjadi pegangan kaum liberal bahwa, ketidak-sederajatan masyarakat merupakan suatu hukum keharusan alami, yang mustahil untuk dihindari, serta merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Keyakinan itu semakin melanggengkan penindasan dan dominasi serta permasalahan kemanusiaan lainnya. Maka keyakinan itu juga yang dapat menjelaskan mengapa pendidikan dalam konteks itu tidaklah mentransformasi struktur dan sistem dominasi, tetapi sekedar menciptakan agar sistem yang ada berjalan dengan baik. Akibat yang paling ironis adalah, pendidikan justru menjadi bagian dari masalah dan gagal menjadi solusi.

## **2. Pendidikan Islam dan Transformasi Sosial**

Salah satu fungsi pendidikan secara konseptual adalah sebagai alat untuk mendorong proses sosial-kemasyarakatan. Fungsi pendidikan dalam proses sosial dimaksud mencakup bidang politik, demokratisasi, kesejajaran dan kesederajatan, penyadaran sosial, dan-yang terpenting-proses pembebasan manusia dari segala hal yang menindas.

Terjadinya berbagai bentuk penindasan dan ketidak-adilan, secara teoritis, seringkali diidentifikasi karena adanya kelompok lemah, yang menjadi objek penindasan dan ketidak-adilan. Kelemahan itu sendiri seringkali disinyalir karena ketidak-sadaran (*unconsciousness*), kebodohan dan ketidak-tahuan-baik secara individu, kelompok masyarakat, maupun negara dan bangsa. Oleh karena itu pendidikan mestinya memberikan penyadaran dan pencerahan kepada masyarakat agar dapat terbebaskan dari persoalan-persoalan yang mengalienasi "kemanusiaannya" tersebut.

Selanjutnya, manusia atau masyarakat yang telah memperoleh pendidikan akan meningkat pula kesadaran diri-yang pada saat bersamaan juga mendorong kesadarannya untuk menjadi manusia/masyarakat merdeka—searah dengan peningkatan pengetahuannya. Manusia dan masyarakat yang telah mendapat pencerahan melalui pendidikan itu akan menjadi agen (anasir pelaksana) bagi perubahan itu; untuk melakukan transformasi sosial menuju ke arah pembebasan dan egalitarian. Dengan demikian, maka secara teoritis, pendidikan mestinya mampu mendorong proses pembebasan dan transformasi sosial masyarakat, dengan mengikis habis segala bentuk penjajahan, penindasan, hegemoni, dan ketidakadilan yang terjadi.

Berangkat dari asumsi teoritis tersebut, maka ketika ada fakta bahwa fenomena penjajahan, penindasan, hegemoni, dan ketidakadilan sosial tersebut masih saja berlangsung sampai sekarang, maka hal ini mengindikasikan bahwa terdapat masalah dalam pendidikan dan paradigma keilmuan kita, yang

menyebabkan pendidikan tidak berfungsi secara konsisten.

Kenyatannya, problem fundamental dalam pendidikan tersebut memang benar-benar kita rasakan. Salah satu yang dapat kita rasakan dalam bentuk yang paling ekstrim dan ironis, penindasan dan pemasungan terhadap kemerdekaan manusia itu juga justru terjadi oleh teknologi—yang merupakan hasil pengetahuan manusia sendiri. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi manusia yang hampir tak terkendali itu ternyata justru telah mendorong proses “dehumanisasi” — sebuah problem kemanusiaan.

Dalam bentuknya yang aktual dengan konteks sekarang, praktek penjajahan, penindasan, dan ketidakadilan itu diwakili sepenuhnya oleh kapitalisme global, yang kini dipaksakan menjadi tata nilai dunia dan menjadi sumber berbagai masalah sosial-kemanusiaan. Dan pendidikan, sekali lagi, tidak dapat melakukan peran keperpihakan terhadap nilai kemanusiaan. Karena—bahkan—pendidikan seolah justru ikut memperkuat berkembangnya kapitalisme tersebut. Pendidikan telah menjadi alat “kekuasaan” untuk meneguhkan struktur yang ada. Padahal, menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan budaya dan pusat pengembangan hubungan subyek-subyek merupakan tugas yang berat dan serius. Apabila lembaga pendidikan telah berfungsi sebagai yang mematikan kesadaran dan kebebasan manusia, maka tidak mungkin diharapkan pendidikan menjadi agen perubahan (Tilaar, 2002:242).

Modernisasi yang ditopang oleh kapitalisme sekarang ini juga telah melahirkan berbagai kecenderungan materialisme dan pragmatisme pada hampir semua bidang kehidupan manusia, tak terkecuali dunia pendidikan. Akibat kecenderungan pragmatisme dan materialisme tersebut, membawa kehidupan ini jauh dari nilai-nilai idealisme. Dalam konteks ini, sebenarnya pendidikan Islam dapat menjadi benteng terakhir; artinya, ketika terjadi pergeseran nilai—yang timbul sebagai akibat modernisasi, dengan materialisme-hedonistik sebagai salah satu cirinya—dan proses reduksi dalam berbagai bidang kehidupan, maka pendidikan Islam bisa dijadikan sebagai pertahanan moral dan budaya untuk melestarikan nilai-nilai ideal yang ada dalam masyarakat. Namun, tentu saja, peran tersebut tidak akan dapat dijalankan, jika dunia pendidikan—dalam hal ini pendidikan Islam—juga ikut larut dalam arus materialisme tersebut.

Pendidikan Islam dapat menjadi kekuatan determinan dalam transformasi sosial, hanya jika ia dikembangkan dengan paradigma kritis-transformatif dan melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan kekuasaan hegemonik. Hal ini tidak berarti pendidikan Islam harus melepaskan diri sama sekali dari suatu kepentingan yang menyebabkan ia tidak melakukan suatu pembelaan sama sekali, karena pada dasarnya tidak ada suatu pandangan atau teori yang bersifat netral dan objektif, melainkan salah satunya bergantung pada paradigma yang dipergunakan (Fakih, 2002:18). Akan tetapi persoalannya adalah pada soal pilihan; pilihan pada kepentingan mana yang akan diperjuangkan, dan kepada siapa keberpihakan akan diberikan. Dalam hal ini pendidikan Islam mesti berani memilih untuk memihak kepada kaum tertindas tersebut; kepada nilai-nilai kemanusiaan.

Sedangkan transformasi sosial yang penulis maksudkan adalah perubahan

menjadi/menuju ke arah yang lebih baik. Yakni perubahan dari sistem nilai dan konstruks sosial yang menindas tidak manusiawi menjadi sistem nilai dan konstruks sosial yang membebaskan dan “memanusiakan”. Dimana, nilai- nilai kemanusiaan yang universal; keadilan, kesejajaran dan kesederajatan, dan HAM dijunjung tinggi.

Disitulah mestinya pendidikan Islam memposisikan diri, jika memang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan-pesan dan misi fundamental keislaman; misi pembebasan.

### **3. Pendidikan Islam dan Perubahan Masyarakat Demokratis**

Perubahan, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena tidak sesuatu yang tidak berubah di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Namun, perubahan itu sendiri bersifat netral, ia dapat menuju ke arah yang positif jika kita arahkan ke sana, sebaliknya jika dibiarkan, perubahan itu dapat menuju ke arah yang destruktif. Maka, pendidikan sebagai aspek kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, harus terlibat dalam perubahan itu. Keterlibatannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya untuk mengadakan penyesuaian diri terhadap perubahan, tetapi bagaimana supaya pendidikan merupakan agen perubahan sosial (Abdul Rohman dalam Ismail SM, et.all, 2001:310).

Maka, pendidikan Islam harus tegas dalam memposisikan diri dalam konteks perubahan tersebut. Dalam hal ini pendidikan Islam harus tampil menjadi pendidikan yang berparadigma kritis (radikal-transformatif); membela nilai kemanusiaan (memanusiakan manusia), membela kaum lemah yang tertindas dan terbelenggu, baik secara ekonomi maupun sosial dan budaya. Memberikan penyadaran dan pencerahan masyarakat agar terjadi perubahan dari struktur ekonomi, sosial, dan budaya yang dzalim menjadi demokratis berkeadilan. Hal ini sesuai dengan esensi ajaran Islam, yakni semangat pembebasan dari segala bentuk alienasi.

Dalam konteks perannya dalam proses perubahan sosial, pendidikan Islam harus mampu mendorong proses perubahan masyarakat ke arah demokratisasi. Dalam rangka tujuan tersebut, maka pendidikan Islam dituntut agar memberikan warna demokrasi yang harus tercermin dalam-paling tidak-dua fondasi pendidikan, yakni paradigma pendidikan dan sistem pendidikan Islam, untuk kemudian diarahkan mendorong demokratisasi pada kehidupan sosial-politik. Tahapan demokratisasi dalam rangka menuju perubahan masyarakat demokratis tersebut penulis bahas satu persatu di bawah ini.

#### **a. Demokratisasi Paradigmatik Pendidikan Islam**

Pembahasan tentang demokrasi paradigmatik pendidikan Islam, terkait dengan persoalan pendidikan sebagai sebuah proses berilmu dan proses pembudayaan serta pewarisan sikap kritis dan ketajaman intelektual dengan pendekatan filosofis. Artinya, jika salah satu aspek pendidikan Islam adalah pengembangan sikap kritis, ketajaman intelektual dan kemandirian berfikir, maka asumsi-sumsi filosofis tentang pendidikan Islam harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi proses tersebut. Inilah yang penulis maksud dengan demokratisasi paradigmatik, dengan pendekatan pendidikan sebagai paradigma proses.

Pendekatan ini penting untuk memberikan peluang kepada setiap subjek didik untuk memiliki kemandirian intelektual dalam berdialog dengan berbagai produk pemikiran ilmiah yang telah ada (Mulkhan, 1994:157).

Jika landasan asumsi-paradigmatik klasik tentang proses pendidikan-sebagai proses mengetahui-ternyata telah memasung kreatifitas intelektual subjek didik, serta menumbuhkan sikap fatalistik dengan penerimaan total tanpa reserve, maka paradigma itu sudah harus dirubah dan dibangun paradigma (asumsi-asumsi dasar) pendidikan baru yang lebih mencerminkan watak demokratis. Karena, dengan inilah subjek didik akan terangsang kreatifitas berfikirnya, tumbuh ketajaman analisa intekelektualnya, sehingga pada akhirnya akan mampu berdialog dengan kondisi apapun di segala tempat dan setiap zaman.

Paradigma lama hanyalah mewariskan kegamangan subjek didik terhadap realitas yang dihadapi, serta kekaguman yang berlebihan terhadap pemikiran-pemikiran dan warisan karya-karya terdahulu, termasuk yang diterima dari gurunya secara turun temurun.

Hal semacam ini berawal dari tidak-adanya demokrasi paradigmatik itu. Lebih jelasnya, adanya anggapan bahwa, generasi masa kini, tidak mempunyai otoritas lagi untuk membuat interpretasi baru terhadap pemikiran keagamaan baru dengan kapasitas ilmunya. Akibatnya, generasi yang datang belakangan hanyalah terpasung dan sekedar mengulang-ulang saja terhadap khazanah lama itu dengan sikap fatalistik dan menerima tanpa reserve. Inilah penyebab kegamangan umat. Keraguan terhadap kemampuan diri sendiri, yang menyebabkan gamang dalam menghadapi persoalan-persoalan, baik pribadi maupun dalam konteks keummatan.

Keyakinan kita, bahwa Islam adalah agama untuk segala zaman dan agama kemanusiaan, mesti memberi landasasan demokratik dalam paradigmatik pendidikan Islam; bahwa setiap orang memiliki hak dan peluang yang sama untuk menjadikan dirinya sebagai muslim sejati (Mulkhan, 1994:157). Kenyataan sejarah membuktikan bahwa suatu pemikiran mengenai apaun saja akan berdimensi historis dan sosiologis. Karena sebuah corak pemikiran, betapa pun dahsyat dan brilliannya pasti terikat ukuran ruang dan waktu (Ma'arif, 1995:viii). Ini berarti bahwa perubahan kehidupan sosial yang semakin hari semakin cepat dan kemampuan manusia yang semakin tinggi dan profesional dalam mengolah lingkungan hidupnya akan menempatkan berbagai pemikiran sebelumnya, sebagai sesuatu yang harus diperbaharui dan ditinjau ulang. Sekali-kali bukan untuk diberhalakan. Disikapi dengan penerimaan dan membenaran secara total seolah-olah mempunyai nilai kebenaran setingkat wahyu. Apalagi kemudian dipertahankan secara apriori dan sikap konservatif, sama sekali tidaklah mencerminkan adanya demokratisasi paradigmatik pendidikan Islam.

Paradigma baru pendidikan Islam harus mampu mengikis semua asumsi-asumsi yang tidak benar itu sampai tuntas. Karena hal itu menghambat dinamika dan proses kemandirian subjek didik, serta bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang hendak kita bangun. Paradigma demikian sangat diperlukan untuk dapat menciptakan pendidikan yang mampu menjawab berbagai macam tantangan yang senantiasa timbul sesuai konteks zamannya.

Setiap hasil pemikiran adalah produk sejarah, dan sangat mungkin untuk ditinjau ulang dan dirubah. Oleh karenanya, pendidikan Islam, selain harus memberikan ruang selebar-lebarnya bagi setiap kemungkinan perubahan, juga harus menanamkan sikap kritis dan terbuka bagi setiap perubahan itu, dengan memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip perubahan itu sendiri. Paradigma pendidikan yang demikian itulah yang dapat melahirkan intelektual yang mempunyai kemampuan antisipasi terhadap perubahan (*versality*) yang tinggi dan sekaligus mampu menciptakan mekanisme yang mendukung serta merangsang kegairahan dan kreasi intelektual dalam kompetisi yang sportif dan dialog intelektual yang kreatif.

b. Demokratisasi Sistem Pendidikan Islam

Sistem pendidikan demokratis hanya mungkin lahir dari paradigma yang demokratis pula. Dengan kata lain, hanya bila ada demokratisasi paradigmatis sajalah sistem pendidikan yang demokratis dapat diaktualisasikan.

Belajar dari pengalaman sejarah intelektualisme Islam-bahwa pendidikan yang tidak demokratis telah memasung kreativitas dan perkembangan intelektual subjek didik-serta tuntutan akan transformasi sosial yang kita harapkan, maka demokratisasi sistem pendidikan Islam merupakan keniscayaan dalam pembaharuan (*perubahan paradigma*) pendidikan Islam. Dari sistem pendidikan yang demokratis itulah, profil intelektual muslim yang kita harapkan akan lahir. Out put pendidikan yang mempunyai integritas pribadi dan keilmuan, serta mempunyai kesadaran akan peran dan makna keberadannya tidak akan dapat dilahirkan dari sistem pendidikan yang tidak memberikan ruang demokrasi; sistem pendidikan yang otoriter dan membelenggu.

Ahmad Syafii Maarif (1985: 80) mengemukakan, bahwa sarjana-sarjana muslim yang diharapkan lahir dari dunia kampus adalah sarjana yang dewasa secara intelektual dan emosional, dengan salah satu indikasinya adalah bahwa lepasan perguruan tinggi mempunyai rasa tanggung-jawab ilmiah dan moral sebagai cerminan dari integritas pribadinya. Sedangkan untuk mencetak sarjana yang bertanggungjawab dan memiliki integritas itu, kampus haruslah merupakan medan bebas bagi pengembangan pemikiran-pemikiran kreatif dan konstruktif.

Demokratisasi sistem pendidikan Islam menjadi hal yang mendesak ketika kita hadapkan kepada kenyataan bahwa pendidikan Islam dituntut untuk mengembangkan dinamika pemikiran dan mampu menangkap makna gejala perubahan dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat menimbulkan dampak pergeseran nilai dan norma. Pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi, bukanlah sekedar kegiatan untuk mewariskan harta kebudayaan dari generasi terdahulu kepada generasi penggantinya yang hanya memungkinkan bersifat reseptif, pasif dan menerima begitu saja. Akan tetapi, ia harus berusaha melatih mahasiswa untuk lebih bersifat direktif, mendorong mereka agar selalu berupaya maju, kreatif dan berjiwa membangun (Ismail, 1996:34-35). Dan mahasiswa demikian, tentu tidak akan dapat dilahirkan dari pendidikan yang tidak demokratis atau memasung kebebasan kreatif civitas akademiknya.

Maka dalam rangka pembaharuan pendidikan, sistem pendidikan dan segala kebijakan yang berkaitan dengannya harus diarahkan agar mampu mempertahankan relevansinya dengan laju perubahan dan pembaharuan itu sendiri. Dalam pada itu, tugas utama lembaga-lembaga pendidikan Islam menurut Syafii Maarif (1994: 33) adalah menciptakan kondisi dan lingkungan pendidikan yang anggun, hingga cukup memberikan kemungkinan bagi lahirnya cendekia-cendekia yang berwawasan luas di samping punya tilikan pandangan yang tajam dalam membaca peta bumi kemanusiaan. Perguruan tinggi Islam harus menghasilkan intelektual dalam arti yang sesungguhnya.

Jika demikian profil cendekiawan dan sarjana yang harus dihasilkan perguruan-perguruan tinggi Islam, maka perguruan-perguruan tinggi Islam harus segera melakukan pembaharuan dan reorientasi terhadap metodologi dan sistem pendidikannya, terutama pada hal-hal yang bersifat paradigmatis. Sebab, profil cendekia dan sarjana yang demikian tidak mungkin dapat dihasilkan dari pendidikan yang feodalistik dan tidak membudayakan sepenuhnya nilai-nilai pendidikan yang demokratis serta merangsang kompetisi akademis secara sportif dan kreatif. Sementara, umumnya pola pengajaran yang berlaku di Indonesia masih berupa penghafalan atau pendiktean bahan-bahan kuliah, sementara para mahasiswa tidak diberi kesempatan yang memadai untuk mengajukan pertanyaan atau membahas permasalahan, disamping bahwa kebiasaan membaca belum merupakan sikap yang umum dikalangan mahasiswa kita. Keadaan ini menurut Amien Rais (1996: 166) mengakibatkan pemikiran inisiatif dan kreatif tidak terangsang; situasi yang berlaku menyebabkan para dosen menganggap diri mereka, atau dianggap oleh para mahasiswa, sebagai "selalu benar" (unerring).

Pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dan banyak dipengaruhi oleh budaya feodal dan paternalistik, nampaknya masih sangat perlu diperbaharui dan banyak pembenahan untuk mengaktualisasikan prinsip dan nilai-nilai yang merupakan tuntutan demokratisasi dan pembaharuan pendidikan tersebut.

c. Demokratisasi Politik dan Pendidikan Islam

Demokrasi, merupakan persoalan yang mendasar dalam pendidikan. Selain demokratisasi paradigmatis dan demokratisasi sistem (dalam proses pendidikan), iklim politik yang demokratis serta kebijakan dan sistem pemerintahan yang kondusif juga merupakan hal yang penting. Sistem politik suatu pemerintahan, akan berpengaruh signifikan terhadap dunia pendidikan, termasuk di dalamnya, pendidikan Islam. Sistem politik dan sistem pemerintahan yang demokratis akan memberikan iklim yang memungkinkan dunia pendidikan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan peran dan karakternya yang sejati.

Sementara, di sisi lain, tatanan politik yang ideal dan kondusif tidak akan dapat diwujudkan bila tidak terlebih dahulu dilakukan upaya pembinaan dan pendewasaan terhadap segenap masyarakat, melalui pendidikan. Sebaliknya, pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan semestinya, manakala sistem politik dan kekuasaan tidak mendukung. Dunia pendidikan tidak akan mungkin dapat mengembangkan budaya akademis yang sportif dan kreatif, jika ada intervensi

politik dan pemerintahan yang masuk ke dalamnya. Tak diragukan lagi, pendidikan dan demokrasi (dalam pengertian politik) mempunyai hubungan resiprokal.

Maka, kebijakan politik-pemerintahan jelas merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan, sehingga dunia pendidikan mempunyai kepentingan terhadap terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Semua pihak mesti mempunyai kesadaran untuk mengarahkan agar interdependensi pendidikan dan politik terjadi dalam hubungan simbiosis mutualisme yang produktif dan positif. Artinya adanya kesadaran politik dan kemauan politik (*political will*) dari pemerintah agar segala kebijakan yang diambil tidak berpengaruh negatif dan kontraproduktif terhadap dunia pendidikan. Sebaliknya, juga harus ada kesadaran dari dunia pendidikan agar mereka dapat ikut membangun dan mengarahkan tatanan dan proses politik-pemerintahan agar mengarah kepada pendidikan, pencerahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam arti, secara kualitatif pendidikan harus ikut mendorong perkembangan politik ke arah yang membangun. Namun harus tetap para peran dan fungsinya, yakni sebagai gerakan dan kekuatan moral.

Dalam rangka pemberdayaan pendidikan, kebijakan politik dan pemerintahan juga harus memberikan iklim yang demokratis dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada dunia pendidikan untuk berkembang secara mandiri, menghidupkan budaya akademis yang merangsang minat intelektual serta untuk menumbuhkan budaya demokrasi di perguruan tinggi itu sendiri.

Disamping kurikulum dan konsepsi-pemikiran pendidikan yang demokratis, untuk menumbuhkan sikap kritis peserta didik pendidikan harus dilakukan dalam iklim Perguruan Tinggi yang demokratis. Paradigma pembebasan—sebagai pembaharuan pendidikan-mengharuskan dihapuskannya apa yang disebut Maarif sebagai “etik otoriter” kampus. Demikian terhadap budaya-budaya feodalisme pendidikan dan paternalistik berlebihan yang anti pencerahan.

Jika pendidikan harus mampu merangsang manusia untuk berfikir mandiri dalam rangka menciptakan gagasan-gagasan yang otentik dan original, maka sistem dan orientasi pendidikan harus mampu membebaskan manusia dari budaya verbal, mekanistik dan dangkal (Maarif, 1994:148 dan Muslih Usa, 1991:24). Karena budaya semacam itu tidak mungkin mengantarkan manusia kepada kehidupan yang lebih manusiawi. Dan budaya verbal dan mekanistik itu sendiri dapat dihilangkan jika demokrasi pendidikan dapat direalisasikan.

Jika ketiga tahapan proses demokrasi tersebut dalam diwujudkan dan dijalankan oleh pendidikan Islam bersama-sama dengan semua lapisan masyarakat yang lain, maka barulah pendidikan Islam akan berhasil dalam mendorong perubahan masyarakat menuju masyarakat demokratis yang kita inginkan. Masyarakat yang harus dapat diwujudkan di tengah tuntutan pluralisme dan tuntutan perubahan global seperti sekarang.

#### **4. Pendidikan Islam di Tengah Perubahan Global**

Perkembangan kehidupan umat manusia yang didorong oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi yang mempercepat proses globalisasi telah menyeret kehidupan manusia kepada kecenderungan-kecenderungan yang melupakan sisi-sisi

spiritualitas. Kecenderungan materilisme-hedonistik, rasionalisme pun tak dapat dibendung lagi. Hal ini tentu saja menimbulkan implikasi-implikasi yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan manusia itu sendiri, tidak terkecuali dunia pendidikan, kehidupan keagamaan, pola pikirnya, sistem nilai dan cara mereka melihat suatu persoalan. Dalam arti sudut pandang dan orientasi mereka dalam menilai sesuatu pun ikut terpengaruh karenanya.

Di sisi lain, globalisasi itu sendiri bukanlah wacana yang netral. Globalisme merupakan wacana yang bias misi dan kepentingan politik, kepentingan imperialisme kapitalis yang jahat (lihat Petras dan Veltmeyer, 2002). Globalisme dan globalisasi merupakan dominasi wacana yang dipaksakan kepada dunia, bahwa seolah-olah globalisasi adalah pilihan yang tidak dapat kita hindari dan harus diterima oleh siapapun (Fakih, 2002).

Dalam pada itu dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan tidak ringan. Selain harus mampu mengikuti dan mengimbangi akselerasi perubahan itu, pendidikan Islam diharuskan untuk memberikan warna dan arah pada perubahan itu. Tentu hal ini bukanlah pekerjaan ringan, karena untuk dapat tetap eksis di tengah perkembangan dan perubahan itu, apalagi untuk mewarnai, kita memerlukan perangkat-perangkat dan kesiapan yang memadai. Untuk tetap bertahan saja, pendidikan Islam harus dapat melakukan lompatan-lompatan yang memenuhi logika persaingan—yang tentu terjadi sepanjang perubahan itu. Maka, untuk dapat mewarnai dan mengarahkan kekuatan sejarah, pendidikan Islam harus terlebih dahulu meletaknya pondasi berupa nilai-nilai dasar yang dapat menjadi pijakan dan sekaligus memberikan arah bagi budaya dan peradaban yang kita inginkan, serta dapat mengkomodasi budaya yang sedang berkembang di satu sisi, dan juga melahirkan generasi yang mempunyai kesiapan penuh untuk melakukan kerja-kerja besar itu..

Tingginya tingkat teknologi yang dicapai manusia juga mengharuskan pendidikan Islam untuk melakukan terobosan yang akurat, agar teknologi bukanlah merupakan hal yang menghambat bagi pengembangan pendidikan Islam dan pewarisan nilai, tetapi justru menjadi hal yang ikut mendorong tercapainya sasaran dan tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Untuk itu, kita mesti melakukan pembenahan; reorientasi dan pembaharuan terlebih dahulu terhadap pendidikan Islam. Sebab, secara historis, pendidikan Islam yang dikembangkan sekarang merupakan warisan dari pendidikan di masa klasik akhir, yang tidak lagi ditegakkan atas fondasi filosofis yang kokoh dan tidak lagi sepenuhnya mencerminkan pendidikan yang sesuai dengan semangat al-Qur'an. Di antara yang menunjukkan rapuhnya landasan filosofis pendidikan Islam ini adalah diterimanya konsep dualisme-dikotomis pendidikan Islam yang membedakan antara apa yang disebut dengan "ilmu agama" dan "ilmu umum" (sekuler). Hal ini dalam prakteknya menimbulkan implikasi yang sangat luas, terutama terhadap sistem pendidikan yang kita jalankan serta profil dan kualitas anak-didik yang dihasilkan.

Jika kita kaitkan dengan pesatnya perkembangan budaya dan teknologi di atas, sudah dapat dipastikan bahwa, generasi yang dihasilkan dari pendidikan yang rapuh itu tidak akan mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkompetisi dan

berkiprah dalam percaturan dunia-empiris, apalagi untuk mengarahkan sejarah menuju peradaban Islam yang diinginkan.

Akan tetapi karena hal tersebut memang menjadi kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri, maka persoalannya sekarang adalah bagaimana kita dapat membenahi wajah dan watak pendidikan Islam itu. Selanjutnya sebagai upaya pembaharuan pendidikan, bagaimana paradigma pendidikan Islam yang mestinya kita kembangkan.

Di sisi lain, globalisasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan— termasuk pendidikan Islam. Tantangan ini berkaitan, terutama ketika pendidikan dimaksudkan untuk membebaskan manusia. Persoalannya adalah bahwa, wacana globalisme dan globalisasi kini telah menginjak-injak dan menertawakan akal sehat kita. Globalisasi kini seakan telah menjadi berhala dalam setiap pemikiran dan diskusi kita.

Hal ini terjadi karena wacana globalisasi tersebut telah mendominasi semua diskursus kita tentang masa depan manusia dan kemungkinan tatanan pergaulan dunia di masa kini dan mendatang. Dominasi wacana di sini adalah bahwa, seolah-olah globalisasi adalah sebuah keniscayaan; sesuatu yang tidak dapat kita tolak dan mau tidak mau kita mesti menerimanya. Globalisasi menjadi satu-satunya wacana dan pilihan terbaik untuk diterapkan sebagai tatanan pergaulan dunia, sehingga tidak ada ruang lagi untuk mencari kemungkinan yang lain (Fakih, 2002). Inilah yang oleh Michel Foucault sebagai proses *mode of domination*.

James Petras dan Henry Veltmeyer juga telah mengungkap kedok dan misi di balik kata (wacana) globalisasi itu. Mereka menyebut globalisasi sebagai imperialisme gaya baru, imperialisme abad 21 (Petras dan Veltmeyer, 2002). Mereka menulis:

“Globalisasi telah menancapkan hegemoni yang senyatanya dan kemudian dihadirkan dengan aroma keniscayaan yang melucuti imaji manusia dan menghalangi pemikiran serta aksi untuk menciptakan sebuah alternatif yang sistematis, yakni tatanan sosial ekonomi lain yang lebih berkeadilan” (Petras dan Veltmeyer, 2002: 1).

Globalisasi sesungguhnya membawa misi-misi ideologis dan ekonomis untuk menciptakan tatanan yang memungkinkan dapat tercapainya kepentingan-kepentingan kelas tertentu. Dalam hal ini, Petras dan Veltmeyer menyatakan:

“Demi kepentingan ideologis dan ekonomi tersebut, tatanan ekonomi dunia saat ini sedang direnovasi untuk secara optimal mengkondisikan tergelarnya sandiwara kerakusan, kepentingan kelas dan memperoleh keuntungan Dengan bebas” (Petras dan Veltmeyer, 2002:1-2).

Dengan demikian, globalisasi sebenarnya tidak lain adalah sebuah pergelaran imperialisme baru dalam skala yang sangat luas, yakni skala dunia. Kepentingan yang dibawa oleh globalisasi tersebut tidak lain adalah kepentingan dari kapitalisme. Untuk mencapai ambisinya, kapitalisme dan menjadi globalisasi sebagai sesuatu untuk membuat manusia seluruh dunia bergantung kepada mereka. Petras dan Veltmeyer melanjutkan:

“Keniscayaan globalisasi dan penyesuaian atau ketundukan seluruh manusia di sentero dunia pada kapitalisme pasar bebas, bergantung pada kemampuan kelas-kelas yang dominan dan berkuasa untuk menelikung manusia di bawah kehendak mereka” (Petras dan Veltmeyer, 2002: 2).

Dengan demikian, maka eksploitasi atas diri manusia dan penjajahan atas martabatnya memang terus terbentang dalam sejarah kehidupan manusia. Dan kini imperialisme itu terjadi dalam bentuk yang baru, lebih dahsyat dan luas. Maka, konsep pendidikan sebagai paradigma pembebasan mendapat tantangan. Inilah tantangan besar pendidikan yang penulis maksudkan, yang akan penulis uraikan lebih lanjut sebagaimana pembahasan berikut.

a. Pendidikan Islam dalam Konteks Perubahan Global

Agar pendidikan Islam tidak kehilangan eksistensi dan peran sentralnya di tengah arus perubahan global, terutama untuk membentuk peradaban alternatif, maka pendidikan Islam harus mempunyai karakter yang memungkinkan bagi kita untuk menggantungkan cita-cita kita dalam membangun peradaban Islam kepada pendidikan Islam. Pertama, selain diformulasikan untuk mengantisipasi perubahan, pendidikan Islam juga harus mengajarkan prinsip-prinsip perubahan itu sendiri kepada anak-didiknya. Dari sini diharapkan lahir anak-didik yang mempunyai daya versality (dayaantisipasi terhadap perubahan) yang tinggi, sehingga ia siap untuk mengarahkan perubahan itu, bukan malah terombang-ambing dalam kecenderungan negatif dampak globalisasi-informasi. Selain menanamkan nilai-nilai, pendidikan Islam juga mesti dapat menggali dan mengembangkan segala potensi anak-didik, meningkatkan ketajaman pandangan, sikap kritis dan kemampuan-keilmuannya untuk memecahkan persoalan-persoalan di zamannya. Sehingga, intelektual yang dihasilkan dari pendidikan Islam, tidak gamang dalam menghadapi setiap perubahan dengan segala permasalahannya.

Kedua, pendidikan Islam harus menekankan keseimbangan antara kemampuan akal-intelektual dengan kekuatan moral-spiritual, antara pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi-sebagai hasil dari cipta dan karsa manusia dengan norma-norma agama (wahyu) sebagai pilar penting yang memberikan arah landasan bagi pengembangan IPTEK tersebut. Dengan demikian, pendidikan Islam memformulasikan antara orientasi profan-keduniaan dengan orientasi transendental (baca: keakhiratan) sekaligus. Hal ini penting bagi konstruksi peradaban yang akan kita bangun.

Pendidikan Islam mesti dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam itu dalam konteks zamannya, agar tidak akan kehilangan relevansi dan “daya kontrol”nya terhadap sejarah. Statemen ini berasumsi bahwa kekuatan sejarah, sebagai realitas, harus diarahkan dengan dan kepada nilai-nilai ideal (cita) Islam melalui pergumulan yang intens dan kreatif. Dari sudut pandang ini, secara konseptual, paradigma pendidikan Islam sudah memenuhi syarat fleksibilitas-transformatif sebagai sistem yang dinamis.

Akan tetapi, sebagaimana yang sering menjadi sorotan tajam beberapa kalangan, dalam pendidikan Islam telah terjadi kesenjangan antara cita-konseptual dengan formulasi praktisnya. Antagonisnya wajah pendidikan Islam ditandai

rapuhnya landasan filosofis, yang kemudian berimbas kepada aspek pendidikan Islam secara keseluruhan, dalam praktik pendidikan Islam.

Persoalan yang kini dihadapi pendidikan Islam, tidak saja pada rapuhnya landasan konseptual, sistem dan metodologi tersebut. Akan tetapi juga tidak jelasnya Paradigma Pendidikan Islam itu” (Mul Khan, 1994: 203). Pada sisi lain, “pendidikan Islam justru sering diterjemahkan sebagai usaha mencetak anak didik dengan sebuah idola yang berifat statis” (Tholhah Hasan dalam Ilyas, 1994:49). Bahkan secara lebih tegas, Amrullah Ahmad (dalam Usa, 1991: 53-54) mengungkapkan, “pendidikan Islam cukup lama mengalami kekaburan, baik dari segi istilah, kandungan isi, proses, hakekat, maupun tujuannya”. Ada kesenjangan antara cita-konseptul (das sollen) pendidikan Islam dengan formulasi praktis/ realitas-faktual (das sein)nya.

b. Perubahan (Pembaharuan) Pendidikan Islam

Pembaharuan dalam pendidikan Islam sangat penting dan mendesak karena, pembaharuan-pembaharuan apapun, dalam hal dan bidang apapun, harus dimulai dan ditempuh lewat pendidikan. Pembaharuan pendidikan dapat dilakukan dalam hal-hal yang bersifat paradigmatis; asumsi-asumsi filosofis-epistemologis mendasar yang mendasari watak pendidikan Islam. Dapat pula dilakukan dalam dataran metodologis dan sistem ataupun dalam hal pandangan terhadap materi/isi pendidikan (ilmu) itu sendiri.

Untuk dapat memainkan peran dan mewarnai nilai hakiki kemanusiaan, kita harus mengembalikan pendidikan Islam pada paradigma yang kreatif, produktif dan integral itu. Dan ini menjadi tantangan berat bagi pendidikan Islam, sebab jika formulasi pendidikan yang mencerminkan integralitas ilmu tidak dapat dirumuskan, maka pendidikan Islam tidak akan mampu berbuat banyak memainkan perannya yang strategis itu.

Maka, dalam rangka usaha pembaharuan pendidikan Islam, minimal tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, pembenahan sistem pendidikan Islam. Sebagaimana telah penulis kemukakan bahwa, masalah mendasar dalam pendidikan Islam adalah kelemahan sistem pendidikan ini, yang berakar pada kerapuhan fondasi filosofis yang mendasari sistem itu (Usa, 1991:151). Outputnya tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan kehidupan di dunia yang selalu berubah dan menantang.

Pembaharuan pendidikan Islam menuntut kita untuk menumbangkan konsep ilmu yang dualisme dikotomis. Dekonstruksi ini merupakan hal yang mendasar dan determinan dalam pembaharuan pendidikan Islam. Pendidikan yang dikotomik, “menyebabkan lahirnya sistem pendidikan umat yang sekularistik, rasionalistik-empiristik, intuitif dan materialistik, dan keadaan tersebut tidak mendukung tata kehidupan umat yang mampu melahirkan peradaban Islami” (Usa, 1991:152).

Bersamaan dengan itu, proses pendidikan Islam juga harus memberikan ruang untuk setiap kemungkinan dikemukakannya interpretasi baru, harus memberikan iklim dialogis-kreatif yang dapat mendorong daya kritis anak didik, tanpa harus dikungkung oleh hambatan etis-normatif yang berlebihan dan tidak pada tempatnya.

Pendidikan Islam harus mampu membangun integritas kepribadian anak-didik, dengan menciptakan mekanisme yang mendukung dan merangsang kegairahan dan kreasi intelektual secara bebas dan bertanggungjawab. Dengan demikian, maka pendidikan merupakan sebuah proses kreatif. Pendidikan kreatif sajalah yang akan mampu beradaptasi dengan perubahan.

## **PENUTUP**

Pembahasan di atas memberikan simpulan bahwa, hubungan antara pendidikan dan masyarakat yang bersifat timbal balik saling mempengaruhi, menegaskan adanya peran strategis pendidikan di dalam terjadinya transformasi sosial. Transformasi sosial tersebut dapat mengambil bentuk merubah dan membangun ulang (rekonstruksi) sistem dan tatanan sosial yang berlaku di tengah masyarakat.

Berhasil tidaknya pendidikan memerankan fungsi tersebut, akan dipengaruhi oleh ideologi dan paradigma yang dianut dan diapikasinya. Untuk bisa memerankan fungsi transformasi sosial, pendidikan Islam membangun formulasi teoritis dan praksisnya di atas bangunan filosofis-ideologis yang sepenuhnya sejalan dengan paradigma pendidikan kritis (*critical paradigm*).

Agar menghasilkan *output* yang baik, pendidikan Islam juga harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi tumbuh dan berkembangnya budaya akademis. Ruang untuk berekspresi dan mengembangkan potensi seluruh civitas akademika secara maksimal. Dalam rangka pemberdayaan pendidikan, pada saat yang sama, kebijakan politik dan pemerintahan juga harus memberikan iklim yang demokratis dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada dunia pendidikan untuk berkembang secara mandiri, menghidupkan budaya akademis yang merangsang minat intelektual serta untuk menumbuhkan budaya demokrasi di lingkungan pendidikan.

Dalam konteks kehidupan global, perubahan dalam kehidupan global yang menimbulkan berbagai persoalan baru kemanusiaan, juga mengharuskan pendidikan Islam untuk menyesuaikan diri, dengan melakukan tinjauan ulang dan reformulasi. Hal ini dikmaksudkan agar pendidikan Islam tidak kehilangan daya kontrolnya terhadap dinamika kehidupan, sekaligus agar mampu menjawab tantangan modernitas tersebut dan memberikan penawar (jalan keluar) bagi jiwa-jiwa manusia modern yang telah mengalami dehumanisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buckley, William F. Jr, "Sang Liberal dan Generasi Bisu" dalam Paulo Freire, Ivan Illich, Eric Fromm (et.al), *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis*, terj. Omi Intan Naomi, Cet.3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Fakih, Mansour, (et. al), *Pendidikan Populer: Panduan Pendidikan Untuk Rakyat*, (Yogyakarta: ReaD Books, kerjasama INSIST-PACT, 2001).
- , *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- , *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar, 2002.
- Ilyas, Yunahar (ed), *Muhammadiyah dan NU : Reorientasi Wawasan Keislaman*, (Yogyakarta: LPPI UMY, LKPSM NU – PP Al-Muhsin Yogyakarta, 1994).
- Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1996).
- Maarif, Ahmad Syafii, *Al-Qur'an: Realitas sosial dan Limbo sejarah (Sebuah Refleksi)*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985).
- , *Peta Bumi Intelektualisme*, (Mizan, Bandung, 1994).
- , *pengantar dalam Membumikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Mulkhan, Abdul Munir, *Paradigma Intelektual Muslim; Pengantar Filsafat Pendidikan Islam Dan Dakwah*, (Yogyakarta: Sipress, 1994).
- O'neil, William F, *Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies*, terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Petras, James and Henry Veltmeyer, *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century*, terj., Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.
- Rais, M. Amien, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Rohman, Abdul, "Pendidikan Islam dalam Perubahan Sosial" dalam Ismail SM, et.all (ed.), *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: IAIN Walisongo Semarang-Pustaka Pelajar, 2001).
- Tilaar, H.A.R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2002).
- Usa, Muslih (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, 1991).